



modul

SEJARAH KEMASYHURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



mupresbalaikirti@gmail.com



museumkepresidenan.id



@balaikirti



@MuspresRI

Sejarah Kemasyhuran Presiden Republik Indonesia

Oleh:
Museum Kepresidenan RI Balai Kirti



Museum Kepresidenan RI Balai Kirti
Direktorar Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
2022



modul

SEJARAH KEMASYHURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab

Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti
Dra. Dewi Murwaningrum, M.Hum

Penulis

Kurniawan Ivan Prasetyo

Editor

Neneng Kartiwi
Arie Januar

Penyedia Materi

Linda Siagian
Eros Rosmiati

Layout dan Grafis

Andi Purwanto
Beby Cahyaning Ratri

Diterbitkan oleh Museum Kepresidenan RI Balai Kirti

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera
Shalom
Om swastiastu
Namo buddhaya
Salam kebajikan
Rahayu

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya penyusunan Modul Sejarah Kemasyhuran Presiden Republik Indonesia ini dapat terselesaikan dengan lancar. Modul ini merupakan buku acuan bagi pengunjung museum yang berisikan mengenai sejarah dan capaian prestasi para presiden Republik Indonesia. Penyusunan modul ini sekaligus upaya untuk menyebarluaskan informasi keberadaan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti.

Keberadaan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti bertujuan untuk menyimpan jejak langkah kepemimpinan para presiden Republik Indonesia yang telah purna bakti. Museum pada masa ini sejatinya merupakan sarana edukasi untuk memperluas wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dan tempat untuk mengenalkan identitas serta jati diri bangsa,

Ucapan terimakasih kepada segenap tim yang telah membantu proses penyusunan Modul Sejarah Kemasyhuran Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan adanya Modul Sejarah Kemasyhuran Presiden Republik Indonesia ini dapat memberikan informasi secara lebih komprehensif dan menarik mengenai sejarah dan capaian prestasi para presiden Republik Indonesia kepada para pengunjung Museum Kepresidenan RI Balai Kirti.

Kami menyadari bahwa Modul Sejarah Kemasyhuran Presiden Republik Indonesia ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan masukan yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam museum di hati.

Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti

Dra. Dewi Murwaningrum, M.Hum

DAFTAR ISI

01**DAFTAR ISI****20****ABDDURAHMAN
WAHID****02****SOEKARNO****26****MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI****08****SOEHARTO****32****SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO****14****B.J HABIBIE****38****DAFTAR PUSTAKA**



SOEKARNO

Biografi Singkat Soekarno



Soekarno, atau biasa dikenal dengan sebutan Bung Karno, adalah presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901.

Ayah Soekarno bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, seorang keturunan bangsawan Bali dari Kerajaan Singaraja. Soekarno sebenarnya memiliki nama asli Kusno. Tetapi, karena sering sakit-sakitan, maka namanya diganti menjadi Soekarno.

Terlahir dari keluarga yang cukup terpendang, Soekarno kecil mampu memperoleh akses pendidikan yang layak.

Soekarno menempuh pendidikan dasar di Europeesche Lagere School atau ELS yang merupakan sekolah untuk anak-anak Eropa dan elite Pribumi pada tahun 1911. Pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikan ke Hogere Burgerschool atau HBS di Surabaya.

Pada tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Technische Hoogeschool atau THS yang merupakan sekolah teknik tinggi. Saat menempuh pendidikan tinggi di THS, Soekarno semakin menggeluti perjuangan politik untuk melawan penjajahan kolonial Belanda.

Soekarno memegang peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan. Bersama dengan sejumlah tokoh, Soekarno turut serta dalam merumuskan dasar negara serta menyusun naskah teks proklamasi. Puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.

Pasca Indonesia merdeka, Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno banyak capaian yang berhasil ditorehkan bagi kemajuan bangsa dan negara.



Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah awal keterlibatan langsung Presiden Soekarno dalam kancah pergolakan kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika serta tatanan politik global. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Colombo.

Konferensi Colombo sendiri diselenggarakan pada 28 April-2 Mei 1954. Konferensi Colombo dihadiri oleh lima perdana menteri dari lima negara, yakni Sir John Kotelawala dari Srilangka, U Nu dari Burma, Jawaharlal Nehru dari India, Mohammad Ali Jinnah dari Pakistan, dan Ali Sastroamidjojo dari Indonesia. Pada konferensi Colombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia, dan Afrika. Hasil Konferensi Colombo dilanjutkan dengan pelaksanaan Konferensi Bogor yang selanjutnya memutuskan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika.



"Bangsa-bangsa dan negeri-negeri kita bukan jajahan lagi. Sekarang kita bebas, berdaulat dan merdeka. Kita menjadi tuan lagi di rumah kita sendiri. Kita tak usah pergi ke benua asing untuk berkonferensi."

Ir. Soekarno



"Teriakkan menantang, bukan karena takut, Suara di malam gelap, ketukan pintu, dan sepatah kata yang akan berkumandang sepanjang masa"

Ir. Soekarno

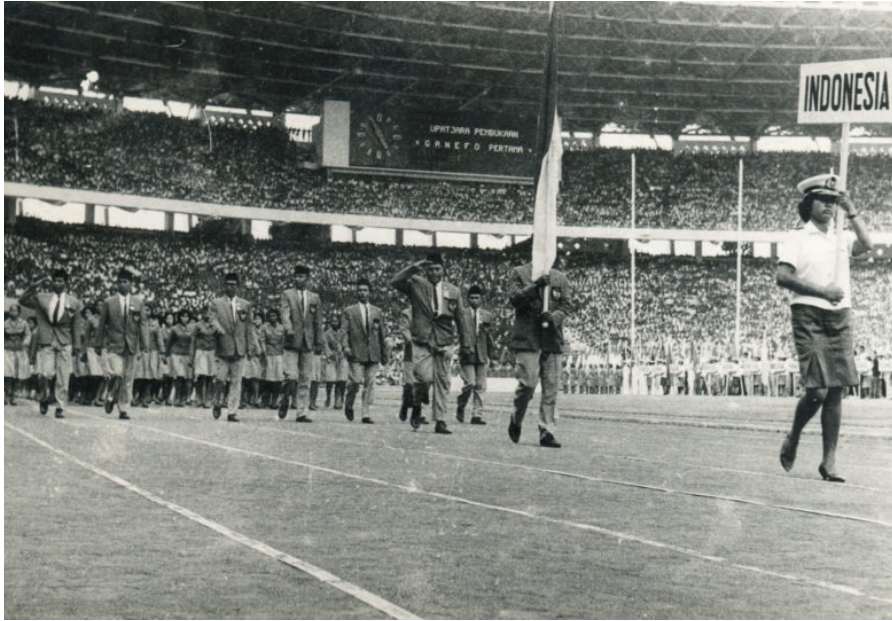
Pelaksanaan KAA

Konferensi Asia Afrika akhirnya dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA.

Agenda dalam Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia.

Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radio Activity dan Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung.

Gebyar Perhelatan Asian Games IV 1962



Asian Games merupakan pagelaran olahraga antar negara-negara di kawasan Asia yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Asian Games pertama diselenggarakan di New Delhi, India pada tahun 1951. Pada pagelaran Asian Games ke-4, tepatnya pada tahun 1962, Indonesia mendapat kepercayaan Dewan Federasi Asian untuk menjadi tuan rumah.

Pemerintah Indonesia selanjutnya melakukan pembangunan infrastruktur secara masif demi mensukseskan acara Asian Games ke-4. Pembangunan tersebut meliputi Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai stadion utama.

Asian Games tidak hanya dimaknai sebagai ajang olahraga semata, melainkan sarana untuk menjalin persahabatan terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya.

Selain stadion utama, pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan proyek stadio renang berkapasitas 8.000 penonton, stadion tenis berkapasitas 5.200 penonton, serta Small Training Football Field atau STFF yang berkapasitas 20.000 penonton.

Selain pembangunan sarana olahraga, Bung Karno juga membangun beberapa bangunan lainnya seperti Patung Selamat Datang, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Gatot Subroto, hingga Jembatan Semanggi. Patung Selamat Datang merupakan patung pemuda dan pemudi yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan.

Asian Games ke-4 diikuti oleh 17 negara Asia. Untuk cabang olahraga yang dipertandingkan ada 13, yakni atletik, akrobatik, bola basket, tinju, balap sepeda, hoki, sepak bola, menembak, tenis meja, tenis, bola voli, dan gulat.

Selama rangkaian acara perlombaan di Asian Games, Indonesia memperoleh 11 medali emas, 12 medali perak, dan 28 medali perunggu. Dengan perolehan tersebut Indonesia menduduki peringkat dua klasemen akhir (runner up) Asian Games 1962. Sedangkan untuk juara umum diraih oleh Jepang.



Operasi Trikora

Permasalahan seputar status Irian Barat tidak terlepas dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Masih terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Papua Barat.

Indonesia maupun Belanda merasa memiliki kuasa lebih atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara tersebut. Sejumlah perundingan terkait status Irian Barat juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, namun hasilnya tetap nihil dan tidak ada kesepakatan bersama.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno selanjutnya menyampaikan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikora berisi: (1) gagalkan pembentukan negara boneka Papua; (2) kibarkan bendera merah putih di Irian Barat; dan (3) bersiap melakukan mobilisasi umum.



"Pokok daripada Trikora ini, sebagai tadi saya katakan, ialah Irian Barat harus bebas, Irian Barat harus dimerdekakan, Irian Barat harus dilepaskan daripada cengkeraman imperialisme"

Ir. Soekarno



Pada 2 Januari 1962, Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia.

Komando Mandala selanjutnya melakukan operasi militer dengan tiga tahap, yakni infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Kekuatan persenjataan Indonesia ditopang dengan mendapat bantuan dari Uni Sovyet.

Permasalahan Irian Barat tersebut selanjutnya mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Pada tahun 1962, Amerika Serikat menekan Belanda untuk menyelesaikan segera menyelesaikan sengketa terkait Irian Barat melalui meja diplomasi (Perundingan New York).

Setelah pengesahan Perjanjian New York, maka tanggal 5 September 1963, Irian Barat resmi diserahkan di bawah *trusteeship* PBB. Indonesia dipercaya sebagai pemelihara sampai "*the act free choise*" rakyat Irian Barat yang dilakukan pada tahun 1968.

Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan pendidikan pada masa presiden Ir. Soekarno adalah Pendidikan Sosialisme yang sesuai tujuan Negara (1961-1966), yaitu:

- Membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotism
- Anak yang berumur 8 Tahun diwajibkan memperoleh pendidikan Sekolah Dasar
- Diadakan ujian-ujian Negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang ketat dan jujur yang mempertahankan kualitas
- Sosialisme Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah, di tingkatan kebijakan, sampai penerapannya dilingkungan pendidikan formal, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi itu merupakan salah satu cara mensejalankan tujuan Negara dan tujuan pendidikan dan lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewargaan Negara atau Civics, yang diajarkan di tingkat SMP dan SMA.





SOEHARTO

Biografi Singkat Soeharto



Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia yang lahir di desa Kemusuk, Bantul, 8 Juni 1921. Ayah Soeharto bernama Kertosudiro (seorang pejabat pengatur air atau ulu-ulu) sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Masa kecil Soeharto di desa Kemusuk dilalui dengan membantu keluarganya di sawah. Ketika membantu keluarganya di sawah, Soeharto senang sekali bermain ketapel dan mencari belut yang memang menjadi makanan kesukaannya.

Manapaki karir militer dari KNIL, PETA, hingga Indonesia merdeka, mengantarkan Soeharto ke kursi kepresidenan

Soeharto menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rendah daerah Wuryantoro (Wonogiri). Selama bersekolah, Soeharto menekuni semua pelajaran. Mata pelajaran yang paling disukainya adalah berhitung. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rendah, Soeharto masuk Sekolah Lanjutan Rendah (Schakel School) di Wonogiri.

Tamat dari Sekolah Lanjutan Rendah, Soeharto bekerja sebagai pegawai di Bank Rakyat (Volksbank). Dan ketika ada pendaftaran militer di KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger)

Pasca Indonesia merdeka, Soeharto menjabat sebagai Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro, Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum AD), Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD), Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, hingga Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)

Pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno resmi menyerahkan kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara kepada Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai Jenderal Besar TNI. Soeharto adalah Presiden Indonesia dengan masa jabatan paling lama dari tahun 1967 sampai 1998.



Swasembada Pangan



Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sedangkan produksi beras nasional hanya 12 juta ton pada tahun 1969. Upaya peningkatan hasil produksi beras selanjutnya ditempuh melalui intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya pemerintah melalui program Bimbingan Masal (BIMAS) berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras. Program tersebut selanjutnya diganti menjadi Program Bimas Gotong Royong.

Program BIMAS Gotong Royong kemudian disempurnakan menjadi Bimas Nasional melalui Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969. Melalui Bimas Nasional, petani memperoleh Intensifikasi Masal (INMAS) serta Intensifikasi Khusus (INSUS).

Selain menggerakkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemerintah juga menerapkan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian. Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara swasembada pangan dan pada tahun 1985 Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO), Edward Saouma untuk hadir dalam Forum Dunia pada tanggal 14 November 1985 di Roma, Italia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan pangan merupakan hasil dari kerja raksasa suatu bangsa.

Keluarga Berencana

Pada masa Presiden Soeharto, permasalahan seputar laju pertumbuhan penduduk mendapat perhatian serius dari pemerintah. Melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan dr. Suwardjo Suryaningrat sebagai kepalanya.

Dalam menjalankan tugasnya melalui program Keluarga Berencana, pemerintah melalui BKKBN melakukan sejumlah pendekatan, mulai dari *Clinical Approach*, *Beyond Family Planning*, Pendekatan Kemasyarakatan, Pendekatan Koordinasi Aktif hingga Pendekatan Keluarga.

pada tanggal 28 Januari 1987, pemerintah mencetuskan program KB Mandiri. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.



"Dua anak lebih baik"



Pelaksanaan program KB yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam perkembangan selanjutnya, program KB mendapat keberhasilan yang cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami penurunan. Tahun 1960-an laju pertumbuhan penduduk 2,32 % turun menjadi 2,10% tahun 1970-an dan 1,97% pada 1980-an.

Selain menggunakan pendekatan dan program yang telah dirumuskan oleh pemerintah, strategi kampanye yang dijalankan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor keberhasilan program Keluarga Berencana.

Keberhasilan program KB pemerintah selanjutnya mendapat penghargaan dari dunia internasional. Soeharto mendapat penghargaan "Global Statement Award" dari Population Institute, Amerika Serikat pada tahun 1988. Satu tahun kemudian Soeharto menerima penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dan KB berupa "United Nations Population Award" dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pembentukan ASEAN



Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi negara di Asia Tenggara yang sejarahnya dibentuk tanggal 8 Agustus 1967.

Sejarah berdirinya ASEAN bermula dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan negara-negara Asia Tenggara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratman (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), dan Narciso Ramodi (Filipina). Pertemuan ini digelar di Bangkok, Thailand, pada 5 hingga 8 Agustus 1967.

Awal pemerintahan Presiden Soeharto ditandai dengan membangun hubungan persahabatan antar negara-negara kawasan Asia Tenggara

Konflik-konflik dunia yang terjadi mendorong negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi inisiator pembentukan ASEAN untuk dapat memastikan keamanan negara dan menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum berujung pada konflik.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pembentukan ASEAN, seperti: persamaan geografis, persamaan nasib, persamaan budaya, dan persamaan kepentingan.

Tujuan ASEAN tertulis dalam Deklarasi Bangkok atau Piagam Bangkok yang ditandatangani oleh 5 (lima) pendiri ASEAN. Tujuan ini didasarkan pada keinginan 5 negara untuk hidup damai, menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Secara garis besar, tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di wilayah ASEAN.



Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Sejak Pelita I hingga Pelita V mutu pendidikan terus-menerus dijadikan salah satu kebijakan pokok. Beberapa kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah:

- EBTANAS dan UMPTN menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik
- Pendidikan sentralistik dan mentalistik pragmatis
- Pemberantasan buta aksara.
- Wajib Belajar 9 Tahun.
- Pembangunan SD Inpres.
- Pembentukan Kelompok Belajar atau kejar
- Pelaksanaan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)





B.J. HABIBIE



Biografi Singkat B.J. Habibie



Bacharuddin Jusuf Habibie
Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Habibie merupakan anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Djalil Habibie dan R.A. Tuty Marini Puspwardoyo Tjitrowardoyo.

Habibie menempuh pendidikan di Hogere Burger School atau HBS. Selepas SMA, Habibie melanjutkan pendidikan tinggi di Departemen Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada tahun 1955, Habibie melanjutkan kuliah di Rheinisch Westfahlische Technische Hochschule (RWTH) di Jerman.

Dikenal sebagai bapak teknologi, Presiden B.J. Habibie juga yang membuka keran demokrasi di RI

Sebelum menjadi presiden, Habibie sempat menjadi CEO dari Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN). Selanjutnya, pada tahun 1978 Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun.

Ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie memimpin proyek pembuatan pesawat N250 Gatotkaca. Dan, pada tahun 1998, Habibie menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

Pasca lengsernya Presiden Soeharto, Habibie menjabat sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Masa pemerintahan Habibie sangat singkat, yakni sekitar 17 bulan.

Namun dalam kurun waktu tersebut, Habibie berhasil menorehkan capaian untuk kemajuan bangsa dan negara. Mulai dari pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan pemilu 1999, hingga perbaikan ekonomi nasional pasca reformasi 1998.



Otonomi Daerah



Periode awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie dihadapkan pada pemerataan pembangunan yang kurang antara daerah di Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Mengatasi permasalahan tersebut, Habibie memberikan otonomi daerah sebagai solusi.

Untuk mendukung Otonomi Daerah, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No 22 Tahun 1999) dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU No 25 Tahun 1999).

Dengan diekluarkannya UU Pemerintahan Daerah, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah semakin nampak hasilnya.

Pergeseran dari pusat ke daerah berlatar pada tiga alasan. Pertama, untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Kedua, meletakkan titik berat otonomi di kabupaten/kota akan semakin mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Ketiga, titik berat otonomi di kabupaten/kota akan menghilangkan micronationalism yang merupakan bibit disintegrasi bangsa. Otonomi Daerah juga mengubah gaya kepemimpinan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, dari kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah dan dari kebijakan yang satu arah menjadi kebijakan yang lebih 1 arah. Otonomi Daerah juga menjadi panduan bagi pemimpin untuk lebih memahami permasalahan di daerahnya.

Pelaksanaan Pemilu 1999



Pelaksanaan Pemilu 1999 dapat dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dikeluarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik sehingga muncul banyak partai-partai politik baru.

Pelaksanaan pemilu 1999 ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. KPU pertama (1999–2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999.

Secara historis, pemilu 1999 bukan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Pemilu pertama berlangsung pada tahun 1955, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 1999 diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu tahun 1999 diselenggarakan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 5 bulan.

KPU selaku penyelenggara pemilu dalam waktu yang singkat telah berhasil merumuskan lebih dari 136 peraturan dan keputusan tentang tata cara pemilu.

Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan oleh banyak pihak, Pemilu 1999 dapat dijalankan secara damai tanpa ada kekacauan yang berarti meski diikuti oleh partai yang jauh lebih banyak.

Pemilu 1999 menghasilkan lima partai dengan perolehan suara terbanyak. Kelima partai tersebut adalah PDIP dengan meraih 153 kursi di parlemen, Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 kursi, PPP 48 kursi, dan PAN 43 kursi.



Perbaikan Ekonomi Pasca Reformasi

Pemerintahan Habibie, dihadapkan pada guncangan krisis ekonomi pasca reformasi 1998. Krisis tersebut meliputi inflasi yang mencapai 650% serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sebelumnya Rp 2.432,00 pada Juli 1997 menjadi Rp 11.050,00 pada Januari 1998 dan Rp 15.000,00 pada Juni 1998.

Selain itu, sistem perbankan Indonesia tidak berfungsi, bisnis mengalami stagnasi, krisis pangan yang membuat harga kebutuhan pokok meningkat drastis, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.



Untuk mengatasi permasalahan dan krisis ekonomi tersebut, Presiden B.J. Habibie mengambil sejumlah langkah strategis, yakni: (1) mengeluarkan kebijakan moneter untuk mematahkan spekulasi dan hiperinflasi, (2) restrukturisasi hutang-hutang swasta, (3) membuat program Jaringan Pengaman Sosial, (4) mengusahakan ketersediaan dana dari bantuan luar negeri dan membatasi pengeluaran negara hanya pada kebutuhan mendesak.

Kebijakan strategis yang diambil Presiden B.J. Habibie tersebut dalam perkembangannya berhasil mengangkat perekonomian nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sebelumnya Rp 15.000,00 pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000,00 pada Oktober 1999, turunya inflasi yang sebelumnya 75,47% pada September 1998 menjadi 2% pada September 1999, berhasil menekan angka pemutusan hubungan kerja, pertumbuhan positif produk domestik bruto (PDB), menahan laju suku bunga Sertifikat BI, hingga meningkatnya jumlah devisa negara.

Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

asa pemerintahan Presiden Habibie, merupakan masa transisi reformasi. Isu otonomi pendidikan sebenarnya hak bagi setiap institusi untuk memutuskan apa yang baik bagi sebuah institusi tanpa ada gangguan dari pihak luar. Konsep ini jelas datang dari semangat kebebasan akademis, ketika hak-hak akademis individu untuk mengekspresikan opini mereka terjamin.

Di dalam Magna Carta of European Universities yang ditandatangani pada 1988 oleh para rektor dari Universitas terbaik se-Eropa dikatakan bahwa universitas merupakan lembaga yang otonom di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam, baik secara geografis maupun budaya. Universitas adalah produsen utama hampir seluruh produk sosial, politik, dan budaya yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dalam rangka menarik minat pasar, pendidikan tinggi di Indonesia harus membuka program-program pelatihan, sertifikasi, serta kuliah jarak jauh yang dikelola dengan logika kolaboratif, yaitu ketersambungan dunia bisnis dan pendidikan. Networking atau jejaring adalah kata kunci yang harus dikembangkan secara terus-menerus oleh setiap universitas dalam rangka mencari pola partnership yang tepat antara universitas dan lembaga keuangan (bisnis, entertainer) dan lembaga riset.





**ABDDURAHMAN
WAHID**

Biografi Singkat K.H. Abddurahman Wahid



Abddurahman Wahid atau yang biasa akrab dengan sebutan Gus Dur adalah presiden keempat Republik Indonesia yang lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940.

Gus Dur merupakan putra dari K.H. Wahid Hasyim sekaligus cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyeikh K.H. Hasyim Asy'ari. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Gus Dur merupakan putra dari Siti Sholehah yang sekaligus merupakan putri dari K.H. Bisri Syansuri.

Terlahir dan besar ditengah lingkungan santri, Gus Dur memiliki pandangan toleransi yang begitu tinggi

Alasan untuk melakukan perjalanan antara lain: rekreasi, pariwisata atau liburan, perjalanan penelitian untuk mengumpulkan informasi, untuk mengunjungi orang di hari raya, perjalanan amal, migrasi untuk memulai hidup di tempat lain, ziarah agama dan perjalanan misi, perjalanan bisnis, perdagangan, bekerja, dan alasan lain seperti untuk mendapatkan perawatan kesehatan atau memulai atau kabur dari perang, atau untuk kesenangan perjalanan.

Perjalanan dapat terjadi dalam bentuk transportasi bertenaga manusia seperti berjalan atau bersepeda, atau dengan kendaraan, seperti transportasi umum, mobil, kereta api dan pesawat terbang.

Perjalanan bisnis, perdagangan, bepergian dan alasan lainnya seperti mendapatkan perawatan kesehatan atau kabur dari perang atau untuk naik kendaraan, seperti transportasi umum, mobil, kereta api dan pesawat terbang.



Penetapan Hari Raya Imlek

Gus Dur dikenal sebagai presiden yang pluralisme serta mengedepankan keberagaman terhadap kaum minoritas di Indonesia, terutama etnis Tionghoa. Bentuk toleransi Gus Dur terhadap etnis Tionghoa adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina. Keppres No 6 Tahun 2000 mencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina.

Sejak dicabutnya Inpres tersebut, masyarakat Tionghoa mendapatkan kebebasan lagi untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya termasuk merayakan upacara-upacara agama seperti imlek, Cap Go Meh, dan sebagainya secara terbuka. Pada 19 Januari 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan No.13/2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif.



"Unity in Diversity"



Selain itu, Gus Dur juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina. Inpres tersebut dikeluarkan untuk mencabut kebijakan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1991 yang mempersulit pemberian visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina .

Landasan dikeluarkannya Inpres No 7 Tahun 2000 adalah untuk menjalin dan mempererat persahabatan antara negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina dipandang perlu meniadakan kebijakan khusus di bidang keimigrasian, sehingga hubungan kedua negara terutama dalam hal lalu lintas orang berlangsung sebagaimana layaknya yang berlaku dalam pergaulan internasional.

Perubahan Nama Irian Menjadi Papua



Konflik di Irian Jaya berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan dimulai sebelum era pemerintahan Gus Dur. Konflik tersebut juga mengarah kepada disintegrasi bangsa. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Gus Dur mengedepankan dialog untuk mencari penyelesaian masalah secara bersama.

Gus Dur kerap pergi ke Irian Jaya untuk menemui tokoh-tokoh dan masyarakat Irian Jaya. Dalam dialog antara Gus Dur dengan masyarakat Irian Jaya, masyarakat menginginkan tumpah darah mereka diganti namanya menjadi Papua.

Gus Dur selanjutnya merespon aspirasi masyarakat Irian Jaya dan selanjutnya mengganti nama Irian Jaya dengan Papua. Gus Dur memiliki dua alasan mengapa nama Irian kurang cocok.

Pertama, kata Irian berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang. Kedua, dalam tradisi orang Jawa, jika orang tua memiliki anak yang sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya segera sembuh.

Legitimasi hukum perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia.



Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Reformasi terhadap lembaga pemerintah dilakukan oleh Gus Dur dengan membubarkan dua departemen yang telah ada sebelumnya, yakni Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos).

Alasan mendasar Gus Dur membubarkan dua Deppen dan Depsos adalah tugas-tugas yang dijalankan oleh kedua departemen tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.



"Tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah"



Selain pembubaran Deppen dan Depsos, Gus Dur juga melakukan reformasi internal di tubuh ABRI. Reformasi ABRI ini dilakukan untuk menciptakan TNI dan Polri yang lebih profesional.

Kebijakan reformasi di tubuh ABRI dirumuskan dalam Ketetapan MPR No VI dan VII Tahun 2000 yang secara konstitusional memisahkan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Fungsi pertahanan dijalankan oleh TNI sementara fungsi keamanan dijalankan oleh Polri.

Gus Dur juga sempat mengeluarkan Maklumat Presiden tanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut sebagai Dekret Presiden.

Secara garis besar, Dekret Presiden berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun, serta menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar.

Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah menuju desentralisasi pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999. Sebuah sistem pendidikan nasional yang disahkan melalui UU Sisdiknas dimana beberapa muatan dalam kebijakan ini secara tidak langsung mencoba melakukan perbaikan mutu pendidikan. Sekolah dan pendidikan adalah dua hal yang bertentangan.

Pendidikan tidak bisa disempitkan pada pendidikan formal semata. Konsep desentralisasi yang diusung pemerintah dan didukung berbagai elemen demokrasi dinegeri ini melahirkan berbagai kebijakan yang memiliki implikasi positif terhadap pendidikan nasional. Demokratisasi pendidikan terkait dengan beberapa masalah utama, antara lain desentralisasi pendidikan melalui perangkat kebijakan pemerintah yaitu Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di negara kita.

g.





**MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI**

Biografi Singkat Megawati Soekarnoputri



Megawati Soekarnoputri adalah presiden kelima Republik Indonesia sekaligus presiden perempuan pertama Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Megawati merupakan anak kedua dari presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dan Ibu Fatmawati.

Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).

Sejarah baru tercipta, Megawati, Srikandi pertama yang memimpin Indonesia

Megawati memiliki latar belakang sebagai seorang politisi. Beliau aktif berpolitik sejak tahun 1987 ketika bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia melalui kongres luar biasa di Surabaya.

Pasca terpilihnya Megawati sebagai Ketua PDI, banyak terjadi gejolak di dalam internal PDI, terutama dari kelompok pendukung Soerjadi. Puncak konflik PDI meletus dalam peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau biasa disebut "Kudatuli" pada tahun 1996

Pada tahun 2001, Megawati naik sebagai presiden menggantikan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati, banyak capaian yang ditorehkan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002, pembentukan Mahkamah Konstitusi, hingga dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.



Pembentukan KPK

Upaya pemberantasan korupsi, dalam sejarah Indonesia, dilakukan dengan pembentukan sejumlah badan atau lembaga anti rasuah dalam perkembangannya. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya: Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan), Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), Tim Penegak Korupsi (TPK), Komisi 4, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Landasan pembentukan KPK adalah Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan undang-undang tersebut, KPK mempunyai tugas: (1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.



Upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah dilakukan dengan mencakup 2 hal, yakni upaya pencegahan dan upaya penindakan



Dalam perkembangan selanjutnya, KPK banyak menangani kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah kasus korupsi simulator SIM, korupsi pengadaan E-KTP, kasus suap sekretaris MA Nurhadi, kasus suap benur Edhy Prabowo, hingga kasus bansos covid-19.



Pelaksanaan Pilpres 2004



Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara langsung berdasarkan pemungutan suara. Pemilihan tersebut akhirnya diselenggarakan pada 5 Juli 2004.

Pemilihan presiden tahun 2004 diselenggarakan dalam dua putaran.

Putaran pertama diikuti oleh lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Total pemilih terdaftar yaitu sebanyak 153.320.544 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 122.293.844 orang atau 79,76 persen menggunakan hak pilihnya. Sementara lebih dari 20 persen lainnya memilih golongan putih atau golput.

Dari total jumlah suara, sebanyak 97,84 persen atau 119.656.868 suara dinyatakan sah. Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla melaju ke putaran kedua. Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan suara 31.569.104 atau 26,61 persen. Sedangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dengan suara sebanyak 39.838.184 atau 33,57 persen.

Putara kedua pemilihan presiden 2004 diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004. Berdasarkan hasil penghitungan suara, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi memperoleh dukungan sebanyak 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Sedangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla mendapatkan suara sebanyak 69.266.350 atau 60,62 persen. Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla akhirnya keluar sebagai pemenang.



Pelunasan Utang IMF

Pada tanggal 5 September 2003, Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerja Sama dengan IMF. Latar belakang pemutusan kerja sama ekonomi dengan IMF adalah kondisi dua tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik.

Pada akhir tahun 2003, inflasi diperkirakan berada di bawah 6%, kurs stabil di sekitar Rp 8.500,00 per 1 USD, suku bunga SBI 3 bulan mencapai 9% per tahun akan lebih rendah, cadangan devisa melampaui USD 34 miliar dan stok utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun menjadi sekitar 67%.

Sasaran utama kebijakan ekonomi dalam tahun 2004 dan sesudah itu adalah memacu perubahan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kestabilan ekonomi yang tetap terjaga.



*Bendera telah aku kibarkan
pantang surut langkahku walau
sendirian*



Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, Indonesia memutuskan hubungan kerjasama dengan IMF. Kerjasama berupa kredit sebesar US\$ 9 miliar berakhir pada November 2003. konsekuensinya penangguhan utang dicabut sehingga pada tahun 2004 Indonesia harus membayar utang beserta bunga sebesar 27 triliun rupiah.

Dalam rangka pengakhiran program ekonomi dengan IMF tersebut, pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi yang dilaksanakan terutama dalam tahun 2003 dan 2004 dengan sasaran pokok: (1) memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai, (2) melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, dan (3) meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Reformulasi konsep pendidikan dan rekonstruksi fondasi pendidikan nasional, utamanya menyangkut hak-hak pendidikan masyarakat dan nilai-nilai dasar pendidikan saat ini mutlak untuk dipikirkan (rethinking) dan direaktualisasi. Salah satu konsepnya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mulai diimplementasikan pada sekolah-sekolah dasar dan menengah di beberapa provinsi di Indonesia, mungkin juga konsep pendidikan “masyarakat belajar” bagi masyarakat akademis seperti digagas Murbandono Hs (1999).

Dengan demikian dalam konteks ini, kebijakan otonomi daerah (melalui diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004) dan desentralisasi pendidikan dalam rangka perbaikan pendidikan ini sangat perlu dan mendesak.





**SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Biografi Singkat Susilo Bambang Yudhoyono



Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden keenam Republik Indonesia yang lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. SBY merupakan putra tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Siti Habibah.

SBY menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Gajah Mada hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas di Pacitan. Selepas lulus pendidikan dasar dan menengah, SBY sempat menempuh pendidikan tinggi di Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang. Namun, pada tahun 1970, SBY masuk ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

Presiden SBY, jenderal bintang empat pilihan rakyat

Pasca lulus dari Akabri, karir militer SBY langsung melesat. SBY pernah memegang jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad, (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad. Komandan Sekolah Pelatih Infanteri, Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad, Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Kepala Staf Kodam Jaya (1996), Pangdam II/Sriwijaya.

SBY juga sempat menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Menkopolsoskam, dan Menko Polkam. Pada tahun 2004 SBY terpilih menjadi presiden dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya serta tahun 2009 kembali terpilih dengan Boediono sebagai wakilnya.



Perbaikan Ekonomi

Pada masa pemerintahan SBY, perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi fokus perhatian pemerintah. Dalam skala ekonomi nasional, pemerintah memperkuat pilar kesejahteraan di pedesaan dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM dijalankan dengan sokongan dana sebesar 68,65 triliun rupiah. Dari pelaksanaan PNPM, infrastruktur desa perlahan dibangun kembali, mulai dari dibukanya jalan di pedesaan, pembangunan jembatan baru, pembangunan irigasi baru, hingga pembangunan pasar desa.

Presiden SBY, selama sepuluh tahun menjabat, juga meninggalkan pondasi perekonomian yang kokoh melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3SI).



Bank Dunia sempat mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat



Di lantai bursa, indikator ekonomi Indonesia meningkat pesat. Pada tahun 2004 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih senilai 1.000,23, namun pada akhir 2013 melonjak mencapai 4,241,3.

Sedangkan dalam pengentasan kemiskinan, pemerintahan SBY memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). pada 2006, BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun rupiah untuk 19,1 juta keluarga.

Pada tahun 2008, Indonesia menghadapi badai krisis ekonomi yang melanda Amerika dan Eropa. Namun, di tengah badai krisis ekonomi, Indonesia masih dapat mempertahankan pertumbuhan hingga 3,9% pada tahun 2009.

Presiden SBY juga menegakkan empat pilar pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), menyediakan lapangan kerja (pro-job), mengentaskan kemiskinan (pro-poor), dan melestarikan lingkungan (pro-environment).

Penyelesaian Konflik Aceh



Pada masa awal pemerintahan, Presiden SBY dihadapkan pada konflik yang mengarah pada disintegrasi di daerah Aceh. Presiden SBY dan wakil presiden Jusuf Kalla selanjutnya mengambil langkah konkrit dan melakukan dialog kepada tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam pandangan SBY, penerapan otonomi khusus di Aceh merupakan langkah terbaik dalam upaya penyelesaian konflik. Selain menempuh langkah konstitusional dengan menetapkan sejumlah regulasi, upaya perdamaian Indonesia dengan GAM juga ditempuh melalui meja perundingan internasional. Perundingan tersebut akhirnya diselenggarakan di Helsinki.

Dalam perundingan Helsinki akhirnya disepakati Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia. Isinya antara lain, pemerintah RI menyepakati pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh, dan memberikan amnesti kepada semua yang terlibat GAM. Pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Otonomi Khusus yang dibuat untuk Aceh.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Helsinki merupakan prestasi besar Presiden SBY dalam memperkuat integrasi bangsa. Presiden SBY telah mengambil langkah progresif dengan mengedepankan dialog dalam penyelesaian masalah Aceh tanpa harus menerjunkan operasi militer. Menurut SBY, solusi militer tak pernah bisa menyelesaikan masalah Aceh secara permanen.



Penanganan Bencana

Pada masa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla, Indonesia kerap dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari tanah longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, hingga tsunami. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi pada masa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla adalah tsunami Aceh tahun 2004, gempa Yogyakarta 2006, letusan Gunung Merapi 2010, hingga letusan Gunung Kelud 2014.

Dalam penanganan bencana tsunami Aceh 2004, Presiden SBY memimpin langsung penyelamatan korban tsunami dengan membuka posko-posko dan mengelola bantuan logistik yang dibutuhkan rakyat. Presiden SBY juga menerapkan kebijakan Open Door Policy dengan membuka diri terhadap bantuan luar negeri berupa pesawat, kapal, militer, pekerja kemanusiaan, wartawan, dan lembaga swadaya masyarakat.



Presiden SBY membuka kesadaran masyarakat agar lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana alam yang bisa sewaktu-waktu terjadi



Pasca penanganan bencana tsunami Aceh 2004, melalui inisiatif pemerintah di bawah Presiden SBY dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia ditetapkan. Presiden SBY kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

Presiden SBY kemudian menjadikan isu lingkungan hidup dan pengelolaan bencana menjadi prioritas ke-9 dari 11 Prioritas Nasional Program Pemerintah 2010–2014. Dengan dukungan DPR, Presiden SBY mendapatkan dukungan penganggaran APBN yang terus meningkat baik. Hal tersebut tidak terlepas dari profesionalitas BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004-2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru, dan sebagainya.

Pada masa pemerintahan Presiden SBY telah diterapkan standar nasional pendidikan yang meliputi:

- Standar isi
- Standar proses
- Standar kompetensi lulusan
- Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Standar sarana dan prasarana
- Standar pengelolaan
- Standar pembiayaan
- Standar penilaian pendidikan



Tata Cara Berkunjung



MUSEUM
KEPRESIDENAN RI
BALAI KIRTI



TATA CARA BERKUNJUNG

KE MUSEUM KEPRESIDENAN RI
BALAI KIRTI



Membuat Surat Permohonan Berkunjung

- Surat Permohonan ditujukan kepada:
**Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti
Kompleks Istana Kepresidenan Bogor
Jl. Ir. H. Juanda No.1**
- Mencantumkan Nomor Kontak (Hp dan Telepon).
- Melampirkan:
 - Daftar Nama Peserta.
 - Fotocopy KTP.
 - Menunjukkan Bukti Hasil Rapid Antigen.
- Surat permohonan dapat dilakukan melalui:
 - **Website:** <https://museumkepresidenan.id/>
 - **Email:** balaikirtimuseumkepresidenanRI@gmail.com
- Permohonan kami terima paling lambat **3 (tiga) hari** sebelum waktu berkunjung.
- Narahubung : **081211511622 / 081211511722**

Waktu Berkunjung:

- **Hari Selasa s.d Jumat**
Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB
- **Hari Sabtu s.d Minggu**
Pukul 09.00 s.d 14.00 WIB

*Kecuali Hari Senin dan Libur Nasional
(TUTUP)*



Memperhatikan Tata Tertib Berkunjung

- Berpakaian Sopan dan Rapi.
Untuk Pria: Kemeja, Celana Panjang (bukan jeans), dan Bersepatu.
Untuk Wanita: Baju Berlengan, Celana/Rok Panjang (bukan jeans), Gaun di bawah lutut, dan Bersepatu.
- Jumlah Pengunjung yang hadir harus sesuai dengan daftar yang ditujukan pada Surat Permohonan.
- Wajib mematuhi Protokol Kesehatan:

MASUK MUSEUM TIDAK DIPERKENANKAN:

- Membawa Tas Ransel, dan sejenisnya.
- Membawa Makanan dan Minuman.
- Membawa Senjata Api, Senjata Tajam, dan Obat-obatan Terlarang.
- Membawa Binatang.
- Menyentuh dan Memegang Media/ Koleksi yang ada di Museum.

**Surat izin masuk dapat dibatalkan atau ditunda sewaktu-waktu apabila ada acara di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, atau jika pengunjung tidak mentaati syarat dan ketentuan yang berlaku.*



balaikirti



Balai kirti



MuspresRI



Museum Kepresidenan RI Balai Kirti

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdulgani, Retnowati. (2007). *Soeharto Kehidupan dan Warisan Peninggalan Presiden Kedua*. Jakarta: KATA HASTA PUSTAKA.

Adams, Cindy. (2018). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT MEDIA PRESSINDO.

Dr. H. Syofyan Saad, M.Pd. (2003). *Indonesia Dalam Era Gus Dur dan Mega*. Jakarta: Uhamka Press.

Makmur Makka, A. (2008). *The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan*. Depok: Pustaka IIMaN.

Pour, Julius, dkk. (2014). *Presiden Republik Indonesia 19 45-2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rifai, Muhammad. (2020). *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009*. Yogyakarta: GARASI.

Saidi, Ridwan. (2009). *Bencana Bersama SBY*. Jakarta: Indewa.

Sumber Internet:

kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id

<https://anri-arsipkepresidenan.iheritage.id/>



MUSEUM KEPRESIDENAN RI BALAI KIRTI

Komplek Istana Kepresidenan Bogor
Jl. Ir. Haji Juanda No. 1, Paledang, Bogor
Jawa Barat 16122

✉ mupresbalaikirti@gmail.com

🌐 museumkepresidenan.id

📷 [@balaikirti](https://www.instagram.com/balaikirti)

🐦 [@MuspresRI](https://twitter.com/MuspresRI)